

RINGKASAN

Firdaunisa Ighfira Ayharsyah. Prosedur Penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas Melalui Aplikasi Satu Kemenkeu Pada KPKNL Surakarta. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, S.E., M.M.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan pengelolaan Barang Milik Negara, pengurusan piutang negara, serta pelaksanaan lelang. KPKNL Surakarta memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi administrasi kedinasan. Upaya ini diwujudkan melalui modernisasi proses administrasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tugas secara efektif dan efisien.

Salah satu bentuk modernisasi yang diterapkan adalah pemanfaatan Aplikasi Satu Kemenkeu sebagai portal layanan internal pegawai yang terintegrasi. Melalui aplikasi ini, berbagai layanan administrasi kedinasan seperti kepegawaian, presensi, perjalanan dinas, pengelolaan surat tugas, dan monitoring kegiatan pejabat/pegawai dapat dilakukan secara elektronik dalam satu ekosistem. Proses persuratan kedinasan, termasuk penerbitan surat tugas perjalanan dinas, diproses melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (Nadine) mulai dari pencatatan surat masuk dan keluar, alur disposisi, hingga penandatanganan elektronik. Implementasi persuratan elektronik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Office Automation sebagai dasar penyelenggaraan layanan administrasi digital secara terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penerapan prosedur penerbitan surat tugas melalui Satu Kemenkeu dan Nadine mencerminkan transformasi digital tata kelola administrasi di KPKNL Surakarta, yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi internal, mempercepat proses pelayanan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memastikan keabsahan dokumen kedinasan melalui penggunaan tanda tangan elektronik. Melalui pemanfaatan aplikasi internal ini, penyelenggaraan perjalanan dinas dapat dilakukan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan akuntabel sesuai prinsip good governance dalam sektor publik.